



Sistem Manajemen Kinerja

Sesuai PP No. 30 Tahun 2019 &
PERMENPANRB No. 08 Tahun 2021

Jakarta, 29 Juni 2021

PP 46/2011 Jo
Perka 1 Tahun 2013

Sasaran **Kerja** Pegawai



Kegiatan Tugas Jabatan

Berbasis aktivitas dan merupakan
penyusunan kegiatan tugas jabatan
berdasarkan tuisi



PP 30/2019 jo
PERMENPANRB 8/2021
Sistem Manajemen Kinerja
PNS

Sasaran **Kinerja** Pegawai



Kinerja Utama

kinerja berdasarkan cascading yang berbasis
hasil diperoleh melalui dialog kinerja

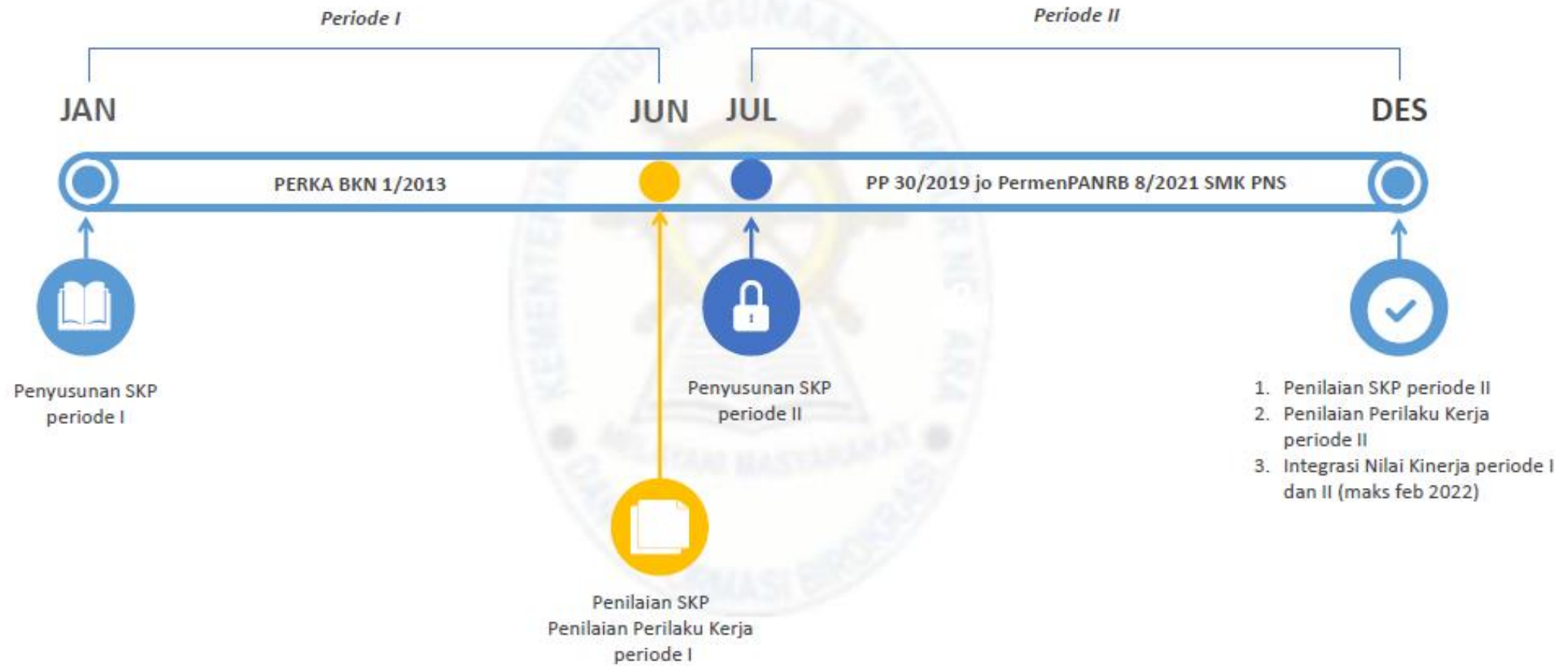
Indikator Kinerja Individu

Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu
pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal
dan eksternal organisasi





PERIODE TRANSISI KINERJA PEGAWAI TAHUN 2021 (SE MENPAN NO 3/2021)



Perbedaan Pencapaian (Hasil Kerja), Aktivitas, dan Kategori Pekerjaan

Rencana kinerja pada SKP harus dituliskan dalam **bahasa pencapaian (hasil kerja)** bukan aktivitas maupun kategori pekerjaan

CONTOH	PENCAPAIAN	AKTIVITAS	KATEGORI
Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG		√	
Layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF			√
Permohonan bantuan teknis diproses dengan cepat dan akurat	√		
Monitoring dan supervisi			√
Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disampaikan tepat waktu.	√		
Sosialisasi			√
Asistensi/ pendampingan terhadap Pemerintah Daerah terkait penggunaan SIMBG		√	
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF	√		
Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis yang hilang	√		
Mengembangkan aplikasi SIMBG		√	
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur SIMBG	√		
Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung		√	
Menyusun Draft Kebijakan terkait Bangunan Gedung		√	
Respon terhadap permintaan bantuan teknis dilakukan dengan cepat dan memuaskan	√		
Pengawasan			√
Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat waktu	√		
Kepuasan instansi pengusul	√		
Menjawab panggilan untuk konsultasi dengan pemerintah daerah		√	
Memberikan bimbingan kinerja kepada pegawai di tim kerja		√	

04

STRATEGI PENYELARASAN KINERJA

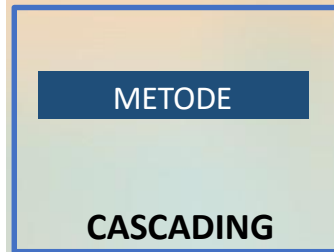
JPT, JA DAN JF

JENIS - JENIS KINERJA



MENENTUKAN PERAN INDIVIDU BERDASARKAN PENYELARASAN

Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan yang ada di masing-masing unit kerja



DIRECT CASCADING

Kinerja dicascading dengan pendekatan :

- ❖ pembagian aspek/tahapan
- ❖ pembagian wilayah
- ❖ pembagian beban target kuantitatif

..... I

METODE CASCADING

melalui dialog kinerja

II

NON - DIRECT CASCADING

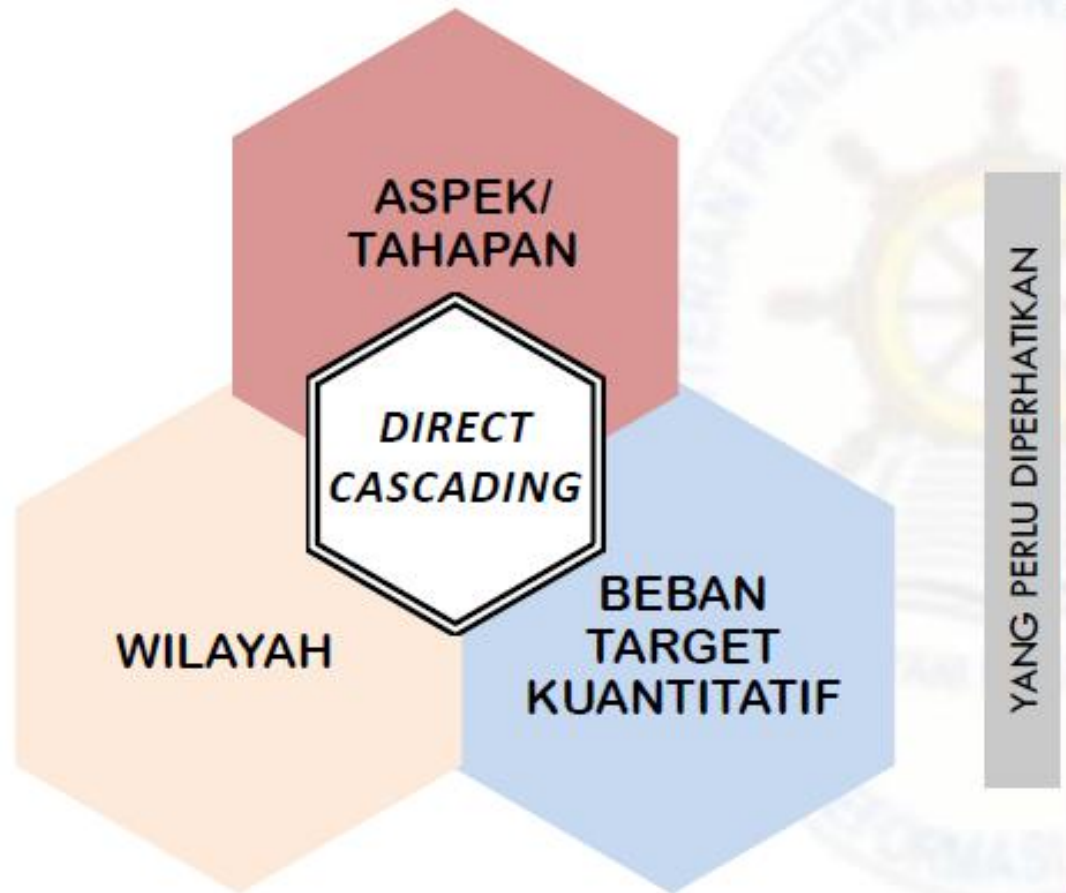
Kinerja dicascading dalam bentuk:

- ❖ layanan
- ❖ produk

.....
Akan direview oleh
Pejabat Pengelola Kinerja

CASCADING DIRECT (CASCADING LANGSUNG)

Pada saat melakukan dialog kinerja atasan harus melakukan *cascading* melalui penentuan strategi yang tepat kepada bawahannya. Strategi dibangun dengan pendekatan “*direct* atau *non direct cascading*”



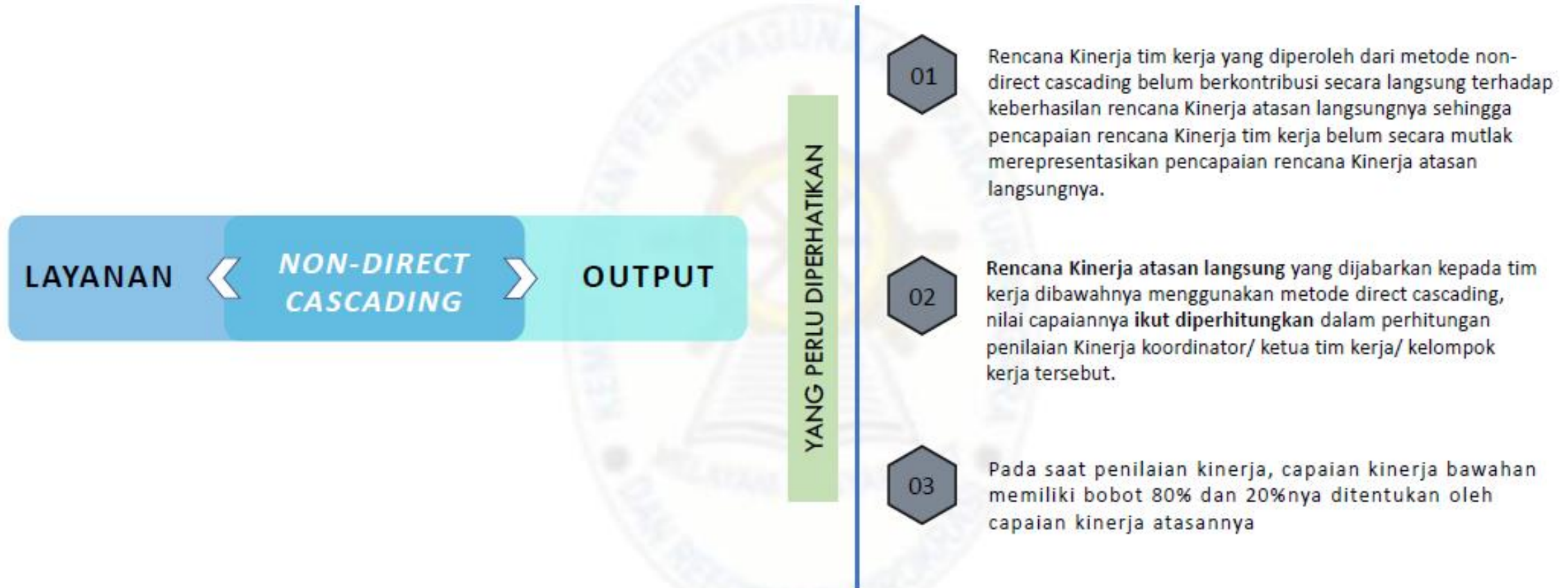
- 01 Rencana Kinerja tim kerja yang diperoleh dari metode direct cascading berkontribusi secara langsung terhadap keberhasilan rencana Kinerja atasan langsungnya sehingga pencapaian rencana Kinerja tim kerja akan merepresentasikan pencapaian rencana Kinerja atasan langsungnya.
- 02 Rencana Kinerja atasan langsung yang dijabarkan kepada tim kerja dibawahnya menggunakan metode direct cascading, nilai capaiannya tidak ikut diperhitungkan dalam perhitungan penilaian kinerja koordinator/ ketua tim kerja/ kelompok kerja tersebut.
- 03 Pada saat penilaian kinerja, capaian kinerja bawahan memiliki bobot 100%

CONTOH *DIRECT CASCADING*



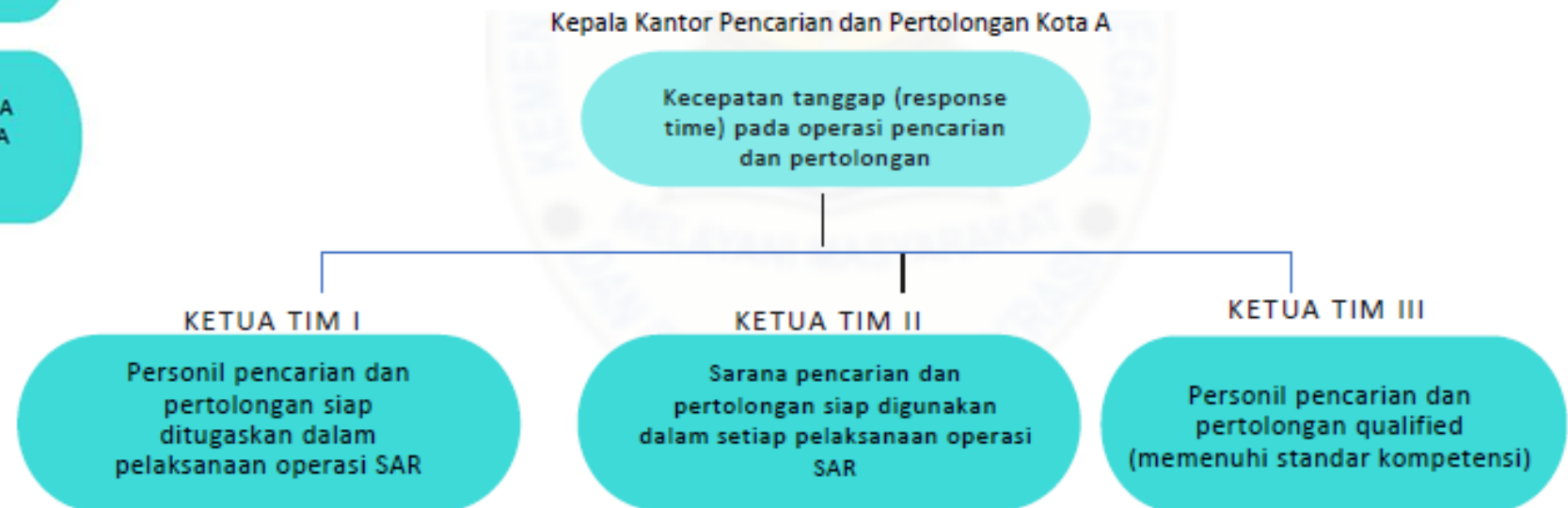
NON – DIRECT CASCADING (CASCADING TIDAK LANGSUNG)

- Pada saat melakukan **dialog kinerja** atasan harus **melakukan cascading** melalui penentuan **strategi** yang tepat kepada bawahannya. Strategi dibangun dengan pendekatan *direct – non direct cascading*





CONTOH *NON-DIRECT CASCADING*





PENTINGNYA *LEADERSHIP* DALAM *CASCADING KINERJA*

JPT/Atasan langsung harus mampu :

1. Memimpin **dialog kinerja** bersama bawahannya
2. Menyampaikan **ekspektasi kinerja** dan menyusun strategi pencapaian kinerja
3. Selama pelaksanaan kinerja memberikan **ongoing feedback** kepada bawahan



Pejabat yang dinilai



JPT/Atasan langsung

MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA

Kinerja (peran) individu dituangkan dalam *Matriks Peran-Hasil*. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mengidentifikasi hasil yang harus dihasilkan oleh setiap anggota unit kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja berdasarkan *cascading* kinerja.



Langkah 1

Tuliskan intermediate outcome/ produk / layanan tim kerja di baris paling atas tabel.



Langkah 2

Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan posisikan ke bawah kolom kiri matriks.



Langkah 3

Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa yang harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit (misalkan: menyelesaikan...) untuk mendukung suatu produk atau layanan?



Langkah 4

Setelah mengetahui peran individu tuliskan pencapaian/hasil kerja yang menggambarkan ekspektasi atas kinerja dimaksud



Langkah 5

Pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana kinerja di dalam SKP pegawai

CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA		
KETUA TIM KERJA	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)
Anggota Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	N/A
Anggota Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja)

MATRIKS PERAN HASIL

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA		
KETUA TIM KERJA	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)	PERAN HASIL (RENCANA KINERJA)
Anggota Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	N/A
Anggota Tim Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja) 	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Peran hasil (rencana kinerja) Peran hasil (rencana kinerja)

FORM SKP

NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG YANG DIINTERVENSI*	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan)	Kuantitas Kualitas Waktu		
2		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil serta sesuai dengan tugas pokok jabatan)	Kuantitas Kualitas Waktu		
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan)			

KETENTUAN BOBOT PENILAIAN KINERJA JA

Metode Cascading	Ketentuan	Rencana Kinerja	Ada/Tidak	Pembagian Bobot
Non-Direct	1	Kinerja Utama	Ada	80
		Kinerja atasan langsung yang diintervensi	Ada	Maksimal 20
		Kinerja Tambahan	Ada	Maksimal 10
Non - Direct	2	Kinerja Utama	Ada	80
		Kinerja atasan langsung yang diintervensi	Ada	Maksimal 20
		Kinerja Tambahan	Tidak	-
Direct	3	Kinerja Utama	Ada	100
		Kinerja atasan langsung yang diintervensi	Tidak	-
		Kinerja Tambahan	Ada	Maksimal 10
Direct	4	Kinerja Utama	Ada	100
		Kinerja atasan langsung yang diintervensi	Tidak	-
		Kinerja Tambahan	Tidak	-

KETERANGAN

1. Bobot digunakan dalam menghitung nilai akhir SKP seorang pegawai
2. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode *direct* maka :
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 100 poin
 - Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode *non-direct* maka :
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 80 poin
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin.



KETENTUAN BOBOT PENILAIAN KINERJA JF

Metode Cascading	Ketentuan	Rencana Kinerja	Ada/Tidak	Total Bobot
Non Direct	1	Kinerja Utama	Ada	80
		Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi	Ada	Maksimal 20
		Kinerja Tambahan	Ada	Maksimal 10
Non Direct	2	Kinerja Utama	Ada	80
		Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi	Ada	Maksimal 20
		Kinerja Tambahan	Tidak	-
Direct	3	Kinerja Utama	Ada	100
		Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi	Tidak	-
		Kinerja Tambahan	Ada	Maksimal 10
Direct	4	Kinerja Utama	Ada	100
		Kinerja atasan langsung/unit kerja/organisasi yang diintervensi	Tidak	-
		Kinerja Tambahan	Tidak	-

KETERANGAN

1. Bobot digunakan dalam menghitung nilai akhir SKP seorang pegawai
2. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode *direct* maka :
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 100 poin
 - Nilai capaian kinerja atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode *non-direct* maka :
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja utama adalah 80 poin
 - Bobot total untuk nilai capaian kinerja atasan/organisasi/unit kerja yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin.

RENTANG KENDALI KINERJA UTAMA JA DAN JF



OUTPUT KENDALI RENDAH

Pencapaian Output dipengaruhi dominan oleh pihak selain pemilik ouput



OUTPUT KENDALI SEDANG

Pencapaian Output dipengaruhi berimbang oleh pemilik ouput dan pihak selaian pemilik ouput



OUPUT KENDALI TINGGI

Pencapaian Output dipengaruhi dominan oleh pemilik ouput

REVIU SKP
JA DAN JF

JENIS
KINERJA JA
DAN JF



JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, JF SELAKU KETUA TIM/ KOOR/ SUBKOOR

Kinerja Utama paling kurang berupa:

1. outcome antara; dan/atau
2. output kendali sedang.
3. output lain dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.



JABATAN FUNGSIONAL

Kinerja utama berupa output dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.



JABATAN PELAKSANA

Kinerja utama paling kurang berupa output kendali tinggi.

REVIU SKP
JA DAN JF

KINERJA
UTAMA JF
SELAKU
KOORDINATOR
/KETUA TIM
KERJA

KINERJA UTAMA

- Kinerja berbasis hasil berdasarkan *cascading* kinerja atasan langsung dan organisasi/unit kerja serta terkait butir kegiatan tugas pokok JF
- Kinerja **dapat dicascading** dan tidak ke anggota Tim Kerja
- Dapat diperoleh dari **penugasan** atau **direktif**

KINERJA TAMBAHAN

- Kinerja berbasis hasil berdasarkan *cascading* kinerja atasan langsung dan organisasi/unit kerja, namun tidak memiliki keterkaitan dengan butir kegiatan tugas pokok JF
- Kinerja dibuktikan dengan Surat Penugasan
- Dapat berupa **development commitment** dan/atau **community involvementt**

01

02

KETERKAITAN KINERJA UTAMA DENGAN BUTIR KEGIATAN

REVIU SKP
JF

HUBUNGAN
KINERJA
UTAMA JF
DENGAN
BUTIR
KEGIATAN

RENCANA KINERA

Kinerja Utama yang diperoleh dengan *cascading* memperhatikan rentang kendali jabatan fungsional

HARUS TERKAIT

Dalam menghasilkan suatu *output kinerja*, terdapat substansi butir2 kegiatan tugas jabatan JF yang terkait untuk menghasilkan *output* dimaksud.

BUTIR – BUTIR KEGIATAN

Butir – butir kegiatan tugas Jabatan JF yang terkait dengan kinerja utama pada SKP seorang JF

HARUS TERKAIT
Butir - butir kegiatan tugas jabatan JF mendukung pencapaian *output* rencana kinerja JF

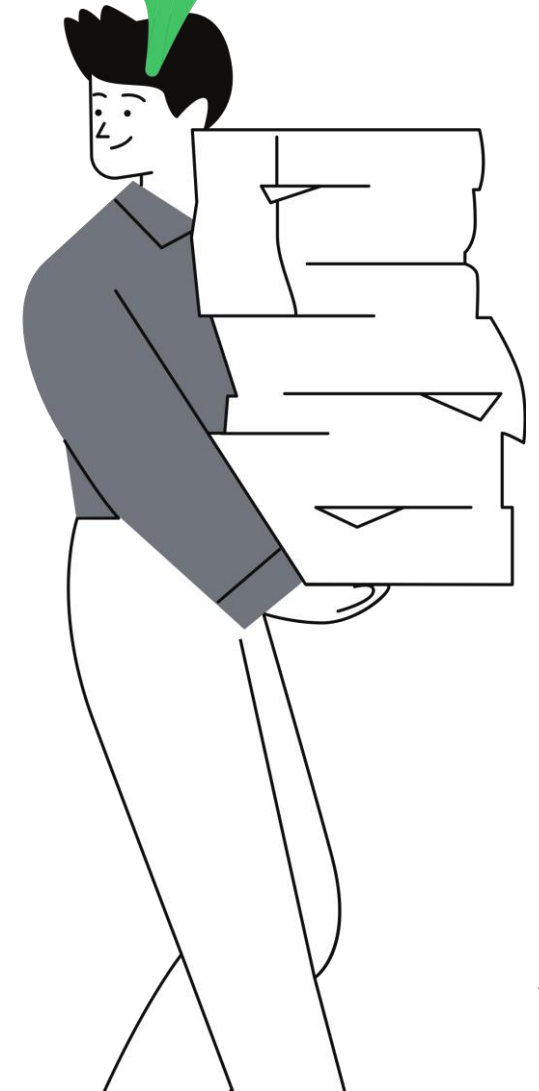
Keterkaitan diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit, jika kinerja tidak terkait maka kinerja digolongkan sebagai kinerja tambahan.

PEJABAT PENGELOLA KINERJA

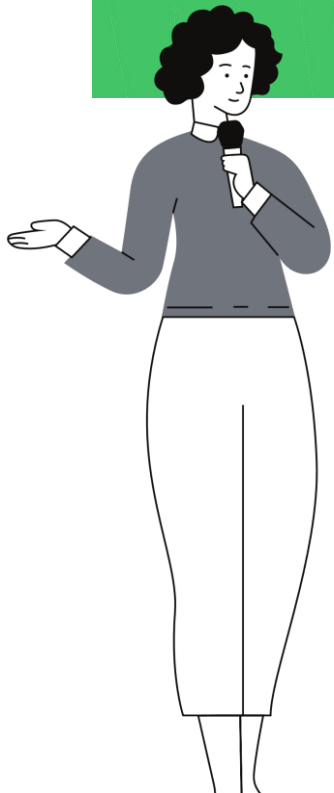
Tugas Utama
Melaksanakan Reviu SKP
sebelum ditetapkan

- Reviu dimaksud meliputi :
- Aspek Keselarasan Kinerja
 - Aspek Kesetaraan dan Tingkat Kinedali kinerja

Arahnya adalah
Jabatan Fungsional.
Selama belum ada, Instansi
dapat membentuk
Tim Pengelola Kinerja.



TIM PENGELOLA KINERJA



PEMBENTUKAN

Disesuaikan dengan kebutuhan Instansi oleh PPK

ANGGOTA TIM

1

Unit Kerja Bidang Perencanaan Organisasi

2

Unit Kerja Bidang Kepegawaian

3

Unit Kerja Bidang Pengawasan

**PENYUSUNAN
RENCANA KINERJA
untuk JPT dan
Pimpinan Unit Kerja
Mandiri**



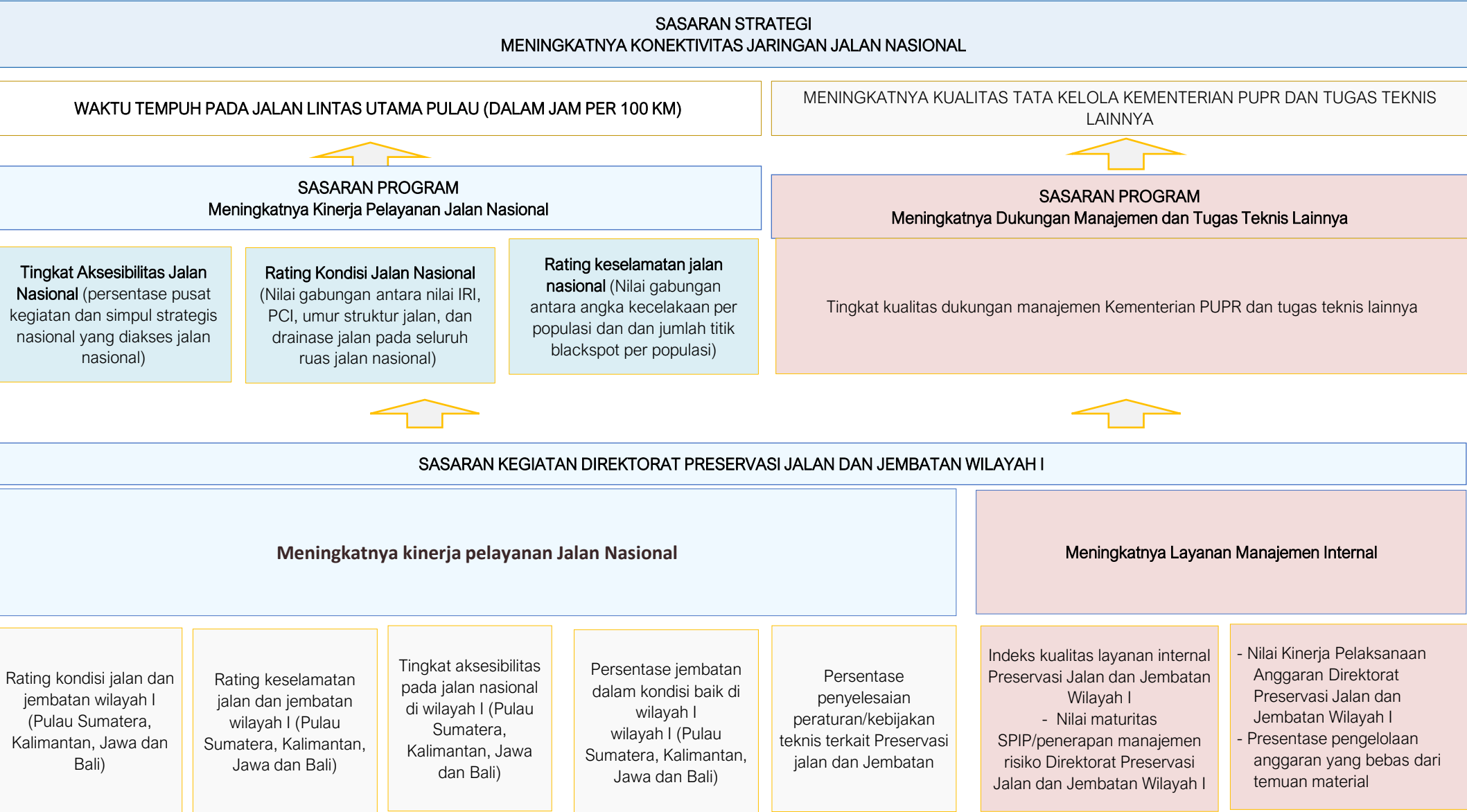
LANGKAH PENYUSUNAN DAN FORMAT RENCANA SKP

Kementerian
PUPR

- a. Model Inisiasi/Dasar
- b. Model Pengembangan



POHON KINERJA DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DITJEN BINA MARGA



PIRAMIDA KINERJA

OUTCOMES

MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL

IKU #1. Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau (Dalam Jam Per 100 KM)

IKU #2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

IKU #1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

IKU #2. Rating Kondisi Jalan Nasional

IKU #3. Rating keselamatan jalan nasional

INTERMEDIATE OUTCOMES

- **Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional di Wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)**
- **Meningkatnya layanan manajemen internal**

- Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Data preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera reliable dan mutakhir
- Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di P. Sumatera berjalan tertib dan sesuai SOP

OUTPUT KENDALI TINGGI

Kementerian
PUPR

Ditjen Bina
Marga

UNIT KERJA
(Direktorat Preservasi
Jalan dan Jembatan
Wilayah I)

TIM KERJA PADA UNIT KERJA
(Kepala Subdirektorat Wilayah I A)

PEGAWAI
(Subkoordinator, Jabatan Fungsional, Pengelola Data,
Pengelola Monev, Pengadministrasi Umum, dll.)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) JPT

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 1 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama		Nama	
NIP		NIP	
Pangkat/Gol Ruang		Pangkat/Gol Ruang	
Jabatan	DIREKTUR PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	Jabatan	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
Unit Kerja	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Unit Kerja	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Contoh SKP JPT

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional	Rating kondisi jalan dan jembatan wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)	
		Rating keselamatan jalan dan jembatan wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)	
		Tingkat aksesibilitas pada jalan nasional di wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik di wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)	
		Persentase penyelesaian peraturan/kebijakan teknis terkait Preservasi jalan dan Jembatan	
2	Meningkatnya kualitas layanan internal Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Meningkatnya kualitas layanan internal Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	
		Nilai maturitas SPIP/penerapan manajemen risiko Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah	
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	
		Persentase pengelolaan anggaran yang bebas dari temuan material	
B. KINERJA TAMBAHAN			
-	<i>(dapat ditambahkan pada tahun berjalan)</i>	-	-

PNS yang dinilai,

Jakarta, 01 Juli 2021

Pejabat Penilai,

(NAMA)

(NAMA)

NIP

NIP

SKP JPT juga harus dilengkapi dengan MANUAL INDIKATOR KINERJA

MANUAL INDIKATOR KINERJA SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI				
KEMENTERIAN PUPR		PERIODE PENILAIAN: 01 JULI 2021 S/D 31 DESEMBER 2021		
PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA		NAMA		
NIP		NIP		
PANGKAT/ GOL RUANG		PANGKAT/ GOL. RUANG		
JABATAN	Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	JABATAN	Direktur Jenderal Bina Marga	
UNIT KERJA	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bina Marga	
RENCANA KINERJA	Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional			
DESKRIPSI RENCANA KINERJA	Pengguna jalan nasional yang dapat memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh. Hal itu dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional.			
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Rating kondisi jalan dan jembatan wilayah I (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali)			
DESKRIPSI	Definisi Peningkatan kualitas jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan.			
	Formula			
	Tujuan Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.			
SATUAN PENGUKURAN	Nilai rating			
JENIS IKU	(X) Outcome	() Output Kendalli Rendah		
PENANGGUNG JAWAB IKU	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I			
PIHAK PENYEDIA DATA	Sub Direktorat Perencanaan Teknis, Subdirektorat Wilayah I.A, , Subdirektorat Wilayah I.B, dan , Subdirektorat Wilayah I.C			
SUMBER DATA	Aplikasi/Laporan			
PERIODE PELAPORAN	() Bulanan	() Triwulan	() Semesteran	(X) Tahunan

Jakarta, 01 Juli 2021
Pegawai yang Dinilai,

(NAMA)

NIP

CONTOH MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL (*Direct Cascading – Ditjen BM*)

NAMA DAN JABATAN PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA		
KEPALA SUB DIREKTORAT WILAYAH I.A.	DATA PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DI PULAU SUMATERA RELIABLE DAN MUTAKHIR	SETIAP PEKERJAAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DI PULAU SUMATERA MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	PELAKSANAAN KONTRAK DALAM PEKERJAAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DI P. SUMATERA BERJALAN TERTIB DAN SESUAI SOP
Subkoordinator I yang merangkap sebagai JF Jalan dan Jembatan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi berjalan tertib
Subkoordinator II yang merangkap sebagai JF Jalan dan Jembatan Ahli Muda	<ul style="list-style-type: none"> Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Kep.Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel, dan Lampung yang reliable dan mutakhir 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan menerapkan SMKK di Provinsi Kep.Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel, Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Kep.Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumsel, Lampung berjalan tertib
JF Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	<ul style="list-style-type: none"> Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang lengkap, reliable dan mutakhir Rekapitulasi data pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang akurat 		<ul style="list-style-type: none"> Setiap klausula dalam kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi terpenuhi dan sesuai dengan SOP
Pengelola Monev	<ul style="list-style-type: none"> Rekapitulasi data preservasi yang dilaporkan secara berkala Data permasalahan teknis yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala. Data masukan, saran, dan keluhan dari pengguna data dievaluasi dan dilaporkan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil evaluasi data pekerjaan perservasi yang sudah menerapkan SMKK yang akurat dan informatif Hasil evaluasi data pekerjaan perservasi yang belum menerapkan SMKK yang akurat dan informatif Data masukan, saran, dan keluhan terkait pekerjaan yang belum menerapkan SMKK dievaluasi dan dilaporkan secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Telaahan kelengkapan data untuk pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di P.Sumatera Rekapitulasi data masukan, saran, dan keluhan pelaksanaan kontrak yang terdokumentasi dan dilaporkan secara berkala

CONTOH MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL (NonDirect Cascading – Ditjen CK)

PEGAWAI	INTERMEDIATE OUTCOME/ PRODUK/ LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA		
KASUBDIT II	<p>APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN SLA (<i>SERVICE LEVEL AGREEMENT</i>) SESUAI NSPK YANG <i>RELIABLE</i> DAN <i>USER-FRIENDLY</i></p>	<p>RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF MELALUI APLIKASI SIMBG</p>	<p>SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS PU DAN PTSP PEMDA KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI PENERBITAN PBG/ IMB DAN SLF MELALUI SIMBG SECARA CEPAT DAN AKURAT</p>
JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	<ul style="list-style-type: none"> • Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK • Telaahan terkait dengan perluasan penggunaan aplikasi SIMBG untuk layanan penyelenggaraan bangunan rumah susun 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengguna dan Pengelola Layanan SIMBG dapat mengetahui progress/tindak lanjut pengaduannya secara <i>up-to-date</i> melalui aplikasi SIMBG ▪ Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat tersusun secara cepat dan akurat (berdasarkan objek atau jenis masalah atau berdasarkan wilayah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun secara lengkap dan sesuai standar penyusunan modul • Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat mempraktekan materi yang disampaikan • Pelatih/Narasumber peningkatan kapasitas layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG kompeten dan tercukupi sesuai kebutuhan • Peserta mendapatkan pelayanan yang memadai selama proses pelaksanaan peningkatan kapasitas
Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SIMBG dapat dioperasikan pada saat <i>soft launching</i> aplikasi SIMBG kepada pemerintah daerah terpilih • Manual book dan simulasi penggunaan aplikasi SIMBG memuat informasi yang jelas, lengkap, mutakhir dan mudah dipahami • Telaahan berdasarkan hasil simulasi fitur-fitur aplikasi SIMBG agar dapat dioperasikan pada saat <i>soft launching</i> • Pengguna mendapatkan akses username dan password sesuai prosedur, mudah, dan cepat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaiki aplikasi berdasarkan hasil <i>survey</i>, masukan, dan saran pengguna aplikasi serta berdasarkan data permasalahan teknis aplikasi. ▪ Jawaban atas pertanyaan terkait teknis aplikasi dari pengelola aplikasi di daerah disampaikan dengan respon cepat dan akurat 	
Pengelola Data	<ul style="list-style-type: none"> • Data pengguna aplikasi SIMBG terdokumentasi secara akurat, reliable, dan dimutakhirkan secara berkala • Data monitoring penggunaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data pengaduan masyarakat terdokumentasi secara akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data peserta, narasumber, notulensi, dokumentasi, dan pertanggungjawaban administrasi peningkatan kapasitas terdokumentasi secara lengkap,

CONTOH SKP JABATAN ADMINISTRATOR



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) JA

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
Nama		Nama			
NIP		NIP			
Pangkat/Gol Ruang		Pangkat/Gol Ruang			
Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.	Jabatan		DIREKTUR PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Unit Kerja		DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG YANG DIINTERVENSI*	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional	Data preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera reliable dan mutakhir	Kuantitas	Persentase data preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera reliable dan mutakhir	95%
			Waktu	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memutakhirkan data preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera yang reliable dan mutakhir secara rutin	Maksimal 1 minggu setelah pekerjaan selesai
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional	Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Kuantitas	Persentase pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	100%
3	Meningkatnya kinerja pelayanan Jalan Nasional	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di P. Sumatera berjalan tertib dan sesuai SOP	Kualitas	Tingkat kesesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan dengan SOP	100%
			Kuantitas	Persentase pelaksanaan kontrak preservasi jalan dan jembatan yang berjalan tertib dan sesuai SOP	100%
			Waktu	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di P. Sumatera yang terlaksana sesuai isi kontrak	Sesuai dengan timeline pada kontrak
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.		<i>diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan)</i>			

Jakarta, 2 Juli 2021

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

(NAMA)

(NAMA)

NIP

NIP

CONTOH SKP JF YANG MERANGKAP SBG SUBKOORDINATOR



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
Nama			Nama		
NIP			NIP		
Pangkat/Gol Ruang			Pangkat/Gol Ruang		
Jabatan	SUBKOORDINATOR I/ JF JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA		Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.	
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU ORGANISASI YANG DIINTERVENSI	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1	Data preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera reliable dan mutakhir	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir	Kuantitas	Persentase data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi reliable dan mutakhir	95%
			Waktu	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memutakhirkan data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir secara rutin	Maksimal 4 hari setelah pekerjaan selesai
2	Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Pulau Sumatera menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi	Kuantitas	Persentase pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	100%
3	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di P. Sumatera berjalan tertib dan sesuai SOP	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi berjalan tertib	Kualitas	Tingkat kesesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi dengan SOP	100%
			Kuantitas	Persentase pelaksanaan kontrak preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang berjalan tertib dan sesuai SOP	100%
			Waktu	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang terlaksana sesuai isi kontrak	Sesuai dengan timeline pada kontrak
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan)			

Jakarta, 2 Juli 2021

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

(NAMA)
NIP

(NAMA)
NIP

Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama			Nama	
NIP			NIP	
Pangkat/Gol Ruang			Pangkat/Gol Ruang	
Jabatan	SUBKOORDINATOR I/ JF JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA		Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
NO.	RENCANA KINERJA	BUTIR KEGIATAN	OUTPUT	ANGKA KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
1	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir	Menganalisis data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi dan merekomendasikan penanganan jembatan	20 Laporan	1,20
2	Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi	Menyusun prosedur pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi	10 Naskah	2,00
3	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi berjalan tertib	Melakukan Technical Proposal Pengadaan Jasa Konsultan di bidang preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi T.A. 2020-2021	10 Laporan	1,60
		Membahas program dan metode kerja untuk Pengadaan Jasa Konsultan di bidang preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi T.A. 2021	10 Laporan	0,80

Jakarta, 2 Juli 2021

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

CONTOH SKP JABATAN FUNGSIONAL (MURNI)



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
Nama			Nama		
NIP			NIP		
Pangkat/Gol Ruang			Pangkat/Gol Ruang		
Jabatan	JF JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA		Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.	
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU ORGANISASI YANG DIINTERVENSI	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang lengkap, reliable dan mutakhir	Kuantitas	Persentase ketersediaan data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang lengkap, reliable dan mutakhir	95%
			Waktu	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memutakhirkan data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utarayang reliable dan mutakhir secara rutin	Maksimal 4 hari setelah pekerjaan selesai
2	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir	Rekapitulasi data pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang akurat	Kualitas	Tingkat akurasi rekapitulasi data pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi	95% akurat
			Kuantitas	Persentase ketersediaan rekapitulasi data pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan per provinsi yang lengkap	95%
3	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambiberjalan tertib dan sesuai SOP	Setiap klausula dalam kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi terpenuhi dan sesuai dengan SOP	Kualitas	Tingkat kesesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utaradengan SOP	100%
			Kuantitas	Persentase pelaksanaan kontrak preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berjalan tertib dan sesuai SOP	100%
			Waktu	Ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utarayang terlaksana sesuai isi kontrak	Sesuai dengan timeline pada kontrak
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan)			

Jakarta, 2 Juli 2021

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

(NAMA)
NIP(NAMA)
NIP

Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
Nama			Nama		
NIP			NIP		
Pangkat/Gol Ruang			Pangkat/Gol Ruang		
Jabatan	JF JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA		Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.	
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
NO.	RENCANA KINERJA	BUTIR KEGIATAN	OUTPUT	ANGKA KREDIT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. KINERJA UTAMA					
1	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang lengkap, reliable dan mutakhir	Menyiapkan Kebutuhan Data dan Jadwal Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan yang ada	30 Naskah	1,50	
		Mengumpulkan dan menetapkan standar perencanaan jembatan dan pengaman jembatan di di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi	30 Laporan	2,10	
2	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi berjalan tertib dan sesuai SOP	Menyusun draf kontrak Pengadaan Jasa Konsultan untuk pekerjaan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi	100 Laporan	1,00	

Jakarta, 2 Juli 2021

Pegawai yang Dinilai,

(Nama)
(NIP)

CONTOH SKP PELAKSANA



SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

KEMENTERIAN PUPR

Periode Penilaian: 2 Juli sd 31 Desember 2021

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
Nama			Nama		
NIP			NIP		
Pangkat/Gol Ruang			Pangkat/Gol Ruang		
Jabatan	PENYUSUN MONEV		Jabatan	KEPALA SUBDIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I.A.	
Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		Unit Kerja	DIREKTORAT PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	
NO	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU ORGANISASI YANG DIINTERVENSI	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
1	Data preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang reliable dan mutakhir	Data permasalahan teknis yang dievaluasi dan dilaporkan secara berkala.	Kuantitas	Persentase ketersediaan data permasalahan teknis di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi yang lengkap, reliable dan mutakhir	95%
			Waktu	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan secara rutin	Maksimal 5 hari setelah pekerjaan selesai
2	Setiap pekerjaan preservasi jalan dan jembatan menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi	Hasil evaluasi data pekerjaan perservasi yang sudah menerapkan SMKK yang akurat dan informatif	Kualitas	Tingkat akurasi evaluasi data pekerjaan perservasi yang sudah menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi	100% akurat
			Kuantitas	Persentase data pekerjaan perservasi yang sudah menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi sudah dievaluasi	80%
			Kualitas	Tingkat akurasi evaluasi data pekerjaan perservasi yang belum menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi	100% akurat
			Kuantitas	Persentase data pekerjaan perservasi yang belum menerapkan SMKK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, dan Jambi sudah dievaluasi	20%
3	Pelaksanaan kontrak dalam pekerjaan preservasi jalan dan jembatan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi berjalan tertib	Rekapitulasi data masukan, saran, dan keluhan pelaksanaan kontrak yang terdokumentasi dan dilaporkan secara berkala	Kuantitas	Persentase ketersediaan rekapitulasi data masukan, saran, dan keluhan pelaksanaan kontrak yang terdokumentasi baik	100%
			Waktu	Ketepatan waktu pelaporan rekapitulasi data masukan, saran, dan keluhan pelaksanaan kontrak per bulan	setiap minggu ke-4 pada akhir bulan
B. KINERJA TAMBAHAN					
1.		(diisi dengan rencana kinerja yang telah dituangkan dalam matriks peran dan hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok jabatan)			Jakarta, 2 Juli 2021

PNS yang dinilai,

Pejabat Penilai,

(NAMA)
NIP

(NAMA)
NIP

TERIMA KASIH

